

INOVASI ALIH MEDIA ARSIP TANAH (ADIARTA) OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATU

Eka Wahyu Ningtyas

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
eka.22110@mhs.unesa.ac.id

Eva Hany Fanida

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
evafanida@unesa.ac.id

Meirinawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
meirinawati@unesa.ac.id

Trenda Aktiva Oktariyanda

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
trendaoktariyanda@unesa.ac.id

Abstrak

Arsip pertanahan merupakan aset penting bagi desa dan kelurahan dalam menunjang keberlangsungan aktivitas pemerintahan. Namun, penataan dan perawatan arsip pertanahan yang ada di desa/kelurahan Kota Batu masih belum tertata dengan baik serta maraknya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu untuk melakukan digitalisasi arsip melalui inovasi *Website Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA)*, yaitu pengelolaan arsip tanah Letter C dan krawangan dalam bentuk digital guna menjamin ketersediaan informasi pertanahan dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan inovasi ADIARTA oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan model inovasi *e-government* oleh Choi dan Chandler (2020) yang meliputi latar terjadinya *e-government*, pendahuluan inovasi *e-government*, dan faktor implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi ADIARTA pada dasarnya telah berjalan dengan baik sebagai respons atas permasalahan pengelolaan arsip pertanahan yang sebelumnya masih bergantung pada sistem manual dan mampu mendukung keamanan serta keberlanjutan arsip tanah. Namun, implementasi inovasi ini belum sepenuhnya optimal karena kurangnya sdm dan mesin scan, kurangnya pendekatan dan sosialisasi, serta belum adanya regulasi yang mengikat, sehingga desa dan kelurahan masih memiliki kewenangan untuk menolak penerapan inovasi ADIARTA.

Kata Kunci: *Electronic government, Inovasi Kearsipan, Arsip Tanah*

Abstract

Land records are an important asset for villages and urban villages in supporting the continuity of governmental activities. However, the organization and maintenance of land archives in villages/urban villages in Batu City have not been well managed, and cases of abuse of authority by officials remain prevalent. These conditions encouraged the Batu City Office of Library and Archives to carry out archive digitization through the Website-Based Land Archive Media Conversion Innovation (ADIARTA), which involves the digital management of Letter c and krawangan land records to ensure the long-term availability of land information. This study aims to analyze the implementation of the ADIARTA innovation by the Batu City Office of Library and Archives using a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on the e-government innovation model proposed by Choi and Chandler (2020), which includes the background of e-government emergence, the introduction of e-government innovation, and implementation factors. The results indicate that the ADIARTA innovation has generally been implemented well as a response to land archive management issues that previously relied on manual systems and has contributed to improving the security and sustainability of land archives. However, its implementation has not yet been fully optimal due to limitations in human resources and scanning equipment, insufficient outreach and

socialization, and the absence of binding regulations, which allows villages and urban villages to retain the authority to refuse the implementation of the ADIARTA innovation.

Keywords: *Electronic Government, Archival Innovation, Land Archives*

PENDAHULUAN

Kearsipan merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Semakin tertata dan terintegrasi arsip suatu negara, maka semakin kuat pula sistem akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Oktavia, 2022). Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengelolaan arsip dituntut untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Menurut Khaeruddin *et al* (2023), digitalisasi arsip merupakan tuntutan di era Revolusi Industri 4.0 yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip dibandingkan dengan sistem konvensional yang masih bergantung pada dokumen fisik serta membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang relatif besar. Regulasi mengenai kearsipan digital di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pencipta arsip dan/atau lembaga karsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip diklasifikasikan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi. Sementara itu, arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional, namun memiliki nilai historis, hukum, dan kultural yang penting bagi lembaga maupun negara. Dokumen arsip pertanahan merupakan salah satu bentuk arsip statis sekaligus arsip vital yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan aktivitas pemerintahan terutama di tingkat desa/kelurahan. Dokumen pertanahan seperti letter c dan krawangan sudah ada sejak jaman kolonial Belanda sekitar tahun 1920-an yang dipergunakan sebagai tanda bukti pendaftaran atas tanah adat yang ada di desa (Oktaviani & Harjono, 2019). Dokumen letter c dan krawangan memiliki nilai penting sebagai bukti legal atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Meskipun tidak diatur secara

resmi oleh Undang-Undang, dalam praktiknya letter c sering digunakan sebagai dasar pemungutan pajak tanah (Mayyasa *et al.*, 2024).

Sistem pengelolaan arsip pertanahan yang masih bersifat konvensional kerap menghadapi berbagai permasalahan serius. Selama ini, pengelolaan arsip pertanahan di desa/kelurahan masih bergantung pada dokumen fisik, seperti berkas kertas dan map dokumen. Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan terutama terkait keamanan dan keberlanjutan arsip. Arsip fisik biasanya disimpan di lemari atau ruang arsip tanpa upaya perawatan. Sehingga menimbulkan berbagai kerusakan akibat kelembapan, sobek, atau bahkan hilang akibat penataan yang kurang rapi dan minimnya sistem pelindung (Teryambodo & Putra, 2024). Situasi ini menyebabkan informasi penting mengenai kepemilikan tanah sulit ditemukan saat dibutuhkan, sehingga berdampak langsung pada terhambatnya informasi pelayanan publik di bidang administrasi pertanahan.

Salah satu daerah dengan permasalahan terkait kerusakan arsip adalah Kota Batu. berdasarkan data yang diperoleh dari Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) sebanyak 70% kondisi arsip pertanahan di Kota Batu mengalami kerusakan yang menyebabkan terhambatnya pelayanan publik yang ada di desa/kelurahan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya keterbatasan ruang penyimpanan dan sarana karsipan di kantor desa, sehingga banyak dokumen yang kondisinya sobek,



tidak terawat, dan amburadul. Berikut merupakan tampilan fisik dari dokumen letter c dan krawangan yang ada di desa/kelurahan:

Gambar 1. Kondisi Arsip Pertanahan Kota Batu

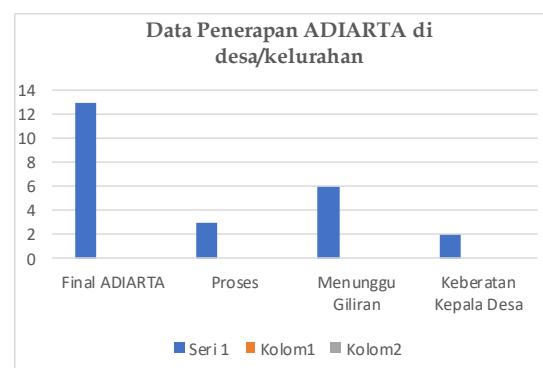
Sumber: Kompasiana, 2022

Penggunaan dokumen Letter C dan Krawangan dalam bentuk fisik menimbulkan berbagai permasalahan. Proses pelayanan administrasi yang bergantung pada dokumen fisik ini berdampak pada lambatnya waktu pelayanan kepada masyarakat, selain itu adanya dokumen fisik menimbulkan polemik penyalahgunaan wewenang yang marak terjadi di Kota Batu. Minimnya sistem pengawasan dan belum adanya mekanisme kontrol digital yang kuat membuka peluang terjadinya pelanggaran etika dan profesionalisme. Sebagaimana dijelaskan oleh Huda dan Suhaini (2024), pengawasan dan pembinaan yang efektif menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan tersebut. Ketika sistem pengawasan lemah dan pencatatan masih bersifat manual, potensi penyalahgunaan jabatan semakin besar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik pertanahan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola arsip. Secara praktis, konflik pertanahan dapat dihindari jika arsip tanah dikelola dengan baik (Safitri, 2018). Lemahnya sistem dokumentasi dan verifikasi kepemilikan tanah sering kali menjadi pemicu konflik pertanahan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah daerah. Sengketa tanah yang terjadi di tengah masyarakat kebanyakan berasal dari lemahnya administrasi pertanahan seperti letter c dan krawangan (Oktaviani & Harjono, 2019).

Kasus sengketa tanah yang terjadi di berbagai wilayah termasuk di Kota Batu, memperlihatkan bahwa akar persoalan utama terletak pada lemahnya sistem administrasi dan pengelolaan arsip pertanahan, terutama dokumen penting seperti letter c ataupun buku krawangan desa yang masih konvensional. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu mengambil Langkah digitalisasi arsip melalui inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA). Langkah merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (PERKA ANRI) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Statis, yang menegaskan pentingnya perlindungan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, hukum, dan kultural. Inovasi ini bertujuan untuk memaksimalkan hidup gambar peta desa dalam keadaan stabil dan jangka waktu yang lama. Adanya inovasi ini memungkinkan informasi

pertanahan dapat diakses setiap saat tanpa harus mengandalkan dokumen fisik saja. Inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu di tahun 2022 berhasil meraih penghargaan sebagai TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bersaing dengan total 2.269 inovasi lainnya di seluruh instansi.

Dalam penerapannya, inovasi ini masih menghadapi kendala, kondisi arsip tanah yang sebagian besar sudah mengalami kerusakan akibat faktor penyimpanan yang kurang memadai menjadi tantangan serius dalam proses digitalisasi, karena banyak arsip yang sulit dibaca, sobek, atau bahkan tidak lengkap yang kemudian menyulitkan proses pemindaian dan penginputan data kedalam sistem digital (Mahardika & Nadia, 2024). Selain itu, berdasarkan data yang didapatkan diketahui bahwa inovasi ini masih belum berjalan merata di seluruh desa/kelurahan di Kota Batu. dari total 24 desa/kelurahan di tahun 2025, jumlah desa/kelurahan yang sudah menggunakan aplikasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) secara final berjumlah 13 desa/kelurahan, lalu untuk desa yang masih dalam proses alih media berjumlah 3 desa/kelurahan, kemudian sebanyak 6 desa/kelurahan menunggu giliran proses alih media, dan sisanya sebanyak 2 desa/kelurahan terdapat keberatan dari kepala desa. Hasil pemetaan dapat dilihat pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Data Penerapan ADIARTA
Sumber: Disperpusip, 2025

Implementasi dari inovasi ini dinilai belum seragam dan masih menghadapi berbagai tantangan teknis pada sistem ADIARTA. Ini

menunjukkan adanya perbedaan antara realitas dan desain inovasi. Dari segi perspektif teknis, hambatan jaringan dan perubahan dalam fitur aplikasi menunjukkan bahwa infrastruktur digital dan kesiapan teknologi dinilai sangat penting bagi keberhasilan suatu sistem layanan publik. Lalu dari segi manajemen, kenyataan bahwa masih ada pihak desa/kelurahan yang menolak adanya penerapan ADIARTA ini menunjukkan adanya permasalahan dalam hal koordinasi, sosialisasi dan penerimaan kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) sebagai bagian dari pengembangan *e-government* di Kota Batu. Penelitian dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu sebagai instansi utama pengelola inovasi, serta di beberapa desa/kelurahan dan masyarakat penerima layanan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari studi literatur berupa jurnal ilmiah, laporan, dan peraturan terkait. Penelitian mengenai Inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu dilakukan melalui wawancara dengan arsiparis ahli muda, tim Alih Media Arsip Tanah, dan pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis penerapan inovasi ADIARTA dengan menggunakan model inovasi *e-government* oleh Choi & Chandler (2020) yang meliputi latar belakang terjadinya *e-government*, pendahuluan inovasi *e-government*, dan faktor implementasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Alih Media Arsip Tanah merupakan suatu inovasi perlindungan arsip melalui proses alih media secara digital melalui *website* yang ditunjukkan untuk desa/kelurahan yang ada di Kota Batu dalam mengamankan arsip pertanahan. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan proses verifikasi, pengecekan dan pelayanan yang berkaitan dengan letter c dan krawangan, mengingat kondisi fisik arsip yang ada di desa/kelurahan sudah banyak mengalami kerusakan. Inovasi adiarta

ini merupakan legalisir/*digital copy* yang sudah terautentikasi oleh TTE (Tanda Tangan Elektronik) sehingga terjamin keasliannya. Adanya inovasi ini juga menjamin hak-hak keperdataan dan keamanan aset desa yang terkandung di dalam dokumen letter c dan krawangan.

Terdapat 3 (tiga) indikator dalam model inovasi *e-government* menurut Choi & Chandler (2020) yang digunakan untuk mendeskripsikan inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Adapun ketiga indikator tersebut diantaranya latar belakang terjadinya *e-government*, pendahuluan inovasi *e-government* yang terdiri dari struktur pendahuluan dan perilaku pendahuluan, dan faktor implementasi. Adapun hasil penelitian menggunakan 3 (tiga) indikator model inovasi *e-government* dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terjadinya *E-Government*

Latar belakang terjadinya *e-government* berangkat dari kebutuhan organisasi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat transformasi administratif guna mengatasi keterbatasan sistem manual yang sudah tidak mampu mendukung kompleksitas pengelolaan pemerintahan (Choi & Chandler, 2020). Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuka peluang bagi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui inovasi berbasis digital atau *e-government* (Nafiah & Oktariyanda, 2024). Teknologi informasi secara strategis telah mengubah cara pemerintah mengambil keputusan, menjadikan proses lebih cepat dan berbasis data (Ma'sum & Nugraha, 2025).

Latar belakang terjadi *e-government* pada *website* Inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) lahir dari keterbatasan terhadap sistem pengelolaan arsip fisik letter c dan krawangan yang ada di desa/kelurahan Kota Batu. Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu di berbagai desa/kelurahan, arsip pertanahan berupa letter c dan krawangan merupakan jenis arsip yang kondisinya paling tidak terawat, banyak ditemukan dalam kondisi rusak, tidak tertata, dan robek akibat rendahnya sistem pemeliharaan. Ketergantungan pada dokumen fisik menjadikan proses pencatatan, penelusuran, dan pengendalian arsip berjalan tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manual yang digunakan sebelumnya tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan administrasi pemerintahan desa yang semakin kompleks, sehingga mendorong perlunya pembaruan melalui inovasi berbasis teknologi. Hal ini kemudian disampaikan oleh Bapak Samsul Riadi, S.E., MM selaku

staff Bagian Seksi Preservasi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu berikut ini:

“Ketika kami melakukan pembinaan ke desa/kelurahan, kami lihat beberapa arsip yang ada, kemudian kami *crosscheck* dan dari banyaknya arsip yang ada, kami langsung tertuju pada arsip pertanahan letter c dan krawangan, karena banyak sekali desa/kelurahan yang pemeliharaan arsipnya sangat buruk, bisa dilihat dari kondisi arsip yang disimpan itu, banyak yang sobek, copot, dan beberapa tulisan itu kurang bisa terbaca (Wawancara pada tanggal 09 Desember 2025)

E-government dimaknai sebagai penyampaian layanan dan informasi melalui internet atau sarana digital lain guna mempermudah pemberian layanan, menekan biaya, serta mendorong partisipasi masyarakat (Fidianingsih & Fanida, 2020). Sebelum adanya ADIARTA, pengelolaan arsip tanah dihadapkan pada lemahnya pengendalian arsip dan maraknya penyalahgunaan wewenang akibat tidak adanya sistem pencatatan yang terintegrasi. Digitalisasi arsip melalui ADIARTA menghadirkan sistem dokumentasi yang lebih terstruktur, sehingga memudahkan proses penelusuran dan verifikasi data serta memperkuat pengawasan terhadap arsip pertanahan. Hak-hak keperdataan masyarakat akan dilindungi melalui sistem digital berbasis *website* dan memastikan ketersediaan arsip tanah selalu ada, dimana sistem lama tidak mampu menjawab permasalahan tersebut.

Penggunaan dokumen fisik dalam sistem pelayanan manual masih banyak ditemukan permasalahan seperti kurang efisiennya proses pelayanan akibat pencarian data menggunakan dokumen fisik. Hal tersebut mendorong inovasi ini lahir sebagai upaya dalam peningkatan proses pelayanan kepada masyarakat. *Website Alih Media Arsip tanah (ADIARTA)* memuat data pertanahan letter c dan krawangan yang dapat diakses melalui media digital. Berikut merupakan tampilan menu pada *website* ADIARTA:



Gambar 3. Menu Pada *Website* ADIARTA

Sumber: Disperpusip, 2025

Untuk mencegah kebocoran data dan meningkatkan keamanan dokumen, disediakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan batasan perangkat akses dipergunakan di tiap desa/kelurahan agar dokumen yang dialihmediakan bersifat legal dan tidak sembarangan disalahgunakan.

2. Pendahuluan Inovasi *E-Government*

a. Struktur Pendahuluan

Struktur pendahuluan dalam inovasi *e-government* merupakan landasan awal yang memengaruhi terciptanya dan berkembangnya sebuah inovasi, khususnya dalam konteks pelayanan publik berbasis digital. Struktur ini dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu faktor lingkungan dan struktur organisasi. Faktor lingkungan mencakup perkembangan teknologi informasi, tuntutan terhadap efektivitas dan keberlanjutan pelayanan, serta dinamika kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi layanan publik. Kemajuan teknologi tersebut mendorong penerapan *e-government* melalui pengembangan berbagai platform digital pemerintahan, seperti *website* resmi, aplikasi layanan publik, sistem pengaduan elektronik, sistem informasi geografis, serta media jejaring sosial yang dikelola secara terintegrasi (Nafiah & Oktariyanda, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa inovasi *e-government* tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis yang menuntut pelayanan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Struktur organisasi pada inovasi ADIARTA disusun secara hierarkis dan terkoordinasi, dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu sebagai admin pusat yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian arsip pertanahan, desa/kelurahan sebagai pengguna layanan yang mengelola dan memanfaatkan inovasi, serta Dinas Komunikasi dan Informasi sebagai pihak pendukung teknis dalam pengembangan sistem. Pembagian peran tersebut memungkinkan pengendalian arsip pertanahan tetap terpusat, namun tetap memberikan ruang bagi desa/kelurahan dalam pemanfaatan data secara berkelanjutan, sehingga informasi pertanahan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik yang rentan rusak dan hilang, melainkan tersimpan secara digital, lebih aman, terorganisir, dan dapat diakses sesuai kebutuhan pelayanan publik.

Adanya pelatihan yang diberikan kepada desa/kelurahan terhadap tata cara penggunaan *website* dan juga adanya tim khusus dalam melakukan alih media ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam penerapan ADIARTA dibangun dengan

pembagian peran dan fungsi yang jelas antara pengelola inovasi dan pengguna sistem. Pelatihan menjadi bagian dari mekanisme struktural untuk memastikan aparatur desa/kelurahan mampu menjalankan peran operasional sesuai kewenangannya, sementara itu, adanya tim khusus dalam proses alih media arsip berfungsi sebagai unit teknis yang bertugas dalam menangani proses alih media agar terstandar dan seragam. Perlu diketahui bahwa dalam proses alih media ini hanya bisa dilaksanakan oleh tim adiarta yang sudah diberi pelatihan, sehingga hasil alih media ini dapat seragam dan berkualitas. Selain itu, peran dan kewenangan antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan desa/kelurahan dirancang secara berbeda dan terstruktur, sehingga mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan arsip dapat berjalan lebih optimal. Berikut merupakan proses alih media arsip oleh tim ADIARTA:



Gambar 4. Proses Alih Media Arsip Tanah
Sumber: Disperpusip Kota Batu, 2025

Secara keseluruhan, struktur organisasi dalam penerapan ADIARTA membentuk sistem kerja yang bertumpu pada hierarki kewenangan, pembagian peran yang spesifik, serta koordinasi lintas instansi. Struktur ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendali dalam implementasi inovasi *e-government*, di mana teknologi ditempatkan sebagai alat pendukung yang operasionalisasinya sangat ditentukan oleh tata kelola organisasi dan kapasitas aparatur di dalamnya. Namun demikian, efektivitas struktur tersebut dalam praktik masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya pendukung. Keterbatasan jumlah alat pemindai dan tenaga pelaksana menyebabkan pelaksanaan alih media harus dilakukan secara bergantian dan bertahap, sehingga proses input data membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi telah terbentuk dengan jelas, keterbatasan kapasitas operasional di tingkat pelaksana berdampak pada lambatnya realisasi inovasi di lapangan.

b. Perilaku Pendahuluan

Perilaku pendahuluan meliputi tindakan awal yang ditunjukkan oleh pimpinan organisasi, kecenderungan dalam menyikapi dan mengambil risiko, serta cara pegawai memandang unsur perubahan dan perbaikan yang diperkenalkan (Samudra & Fanida, 2024). Perilaku pendahuluan mencakup hambatan berupa keterbatasan adaptasi pegawai terhadap teknologi baru serta minimnya evaluasi inovasi yang disampaikan kepada masyarakat (Nafiah & Oktariyanda, 2024). Perilaku pendahuluan dalam penerapan inovasi ADIARTA tercermin dari cara aktor di dalam organisasi merespons perubahan sistem dari pengelolaan arsip manual menuju sistem digital berbasis *website*. Hal tersebut juga mencakup hambatan berupa keterbatasan adaptasi pegawai terhadap teknologi baru serta minimnya evaluasi inovasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Dalam penerapan inovasi ADIARTA, sosialisasi dan pembinaan dilakukan kepada desa/kelurahan secara bertahap. Sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media pengenalan teknis sistem, tetapi juga sebagai sarana membangun pemahaman mengenai urgensi perubahan dan tujuan inovasi. Beragam respons yang muncul dalam hal ini mulai dari penerimaan langsung oleh desa/kelurahan, adanya keraguan, hingga penolakan oleh desa/kelurahan dalam hal ini menunjukkan bahwa perilaku pendahuluan aparatur desa dipengaruhi oleh tingkat kesiapan, kepercayaan terhadap sistem baru, dan juga adanya persepsi risiko yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi digital. Dalam praktik awal penerapan ADIARTA, perilaku aparatur desa juga dipengaruhi oleh kualitas hasil kerja yang diterima. Ketidaksiapan sarana pendukung pada tahap awal, khususnya kualitas hasil alih media yang kurang optimal, memicu sikap penolakan dan kehati-hatian aparatur desa.

Pada tahap awal penerapan inovasi ADIARTA, masih ditemukan sejumlah kendala teknis berupa error pada sistem, yang memengaruhi kepercayaan pengguna dalam memanfaatkan aplikasi. Kondisi tersebut merupakan bagian dari proses adaptasi awal terhadap penerapan sistem digital yang sebelumnya belum pernah digunakan dalam pengelolaan arsip pertanahan. Namun, seiring berjalanannya waktu, respons aparatur terhadap kendala tersebut menunjukkan perilaku pendahuluan yang positif, ditandai dengan adanya upaya perbaikan dan pembenahan sistem secara berkelanjutan melalui pemeliharaan aplikasi sehingga didapatkan hasil

bawa sistem ini sekarang sudah minim para *error*.

Namun demikian, meskipun pemahaman dan penerimaan aparatur desa terhadap inovasi ADIARTA tergolong baik, perilaku pendahuluan dalam bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Masyarakat dalam hal ini diposisikan sebagai penerima manfaat akhir dari inovasi ADIARTA. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan maupun penggunaan sistem, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat berupa kepastian akan ketersediaan dan keamanan informasi arsip pertanahan yang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi. Sosialisasi yang dilakukan lebih banyak berfokus pada internal pemerintahan desa/kelurahan, sehingga masyarakat sebagai pengguna akhir belum sepenuhnya memahami keberadaan dan manfaat inovasi ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku pendahuluan dalam inovasi ADIARTA masih perlu diperkuat, khususnya dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat agar inovasi tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.

3. Faktor Implementasi

Faktor implementasi dipahami sebagai adanya berbagai permasalahan muncul dan dihadapi instansi, yang kemudian mendorong lahirnya inovasi sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Pada tahap implementasi, keberhasilan maupun kegagalan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat (Fidianingsih & Fanida, 2020). Dalam implementasi ADIARTA, inovasi ini muncul sebagai respons langsung terhadap permasalahan pengelolaan arsip pertanahan yang tidak tertata, rentan rusak, dan maraknya penyalahgunaan kewenangan. Ketergantungan penuh pada dokumen fisik letter c dan krawangan menjadikan kualitas pelayanan dan keakuratan informasi sangat bergantung pada kondisi arsip tersebut. Implementasi ADIARTA kemudian diarahkan untuk mengamankan informasi pertanahan melalui penyediaan salinan digital yang dilengkapi dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE), sehingga aspek legalitas dan keamanan dokumen tetap terjaga meskipun berbentuk digital. Penekanan pada keamanan ini menunjukkan bahwa tujuan inovasi telah dirumuskan secara jelas dan terukur, yakni perlindungan arsip vital dan keberlanjutan informasi pertanahan.

Faktor pendukung dalam inovasi ini terlihat dari komunikasi dan pembagian kerja antara pemerintah desa/kelurahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta

Dinas Komunikasi dan Informatika yang memperlihatkan adanya pembagian peran yang terstruktur dalam pengelolaan inovasi. Selain itu, inovasi ini juga memberikan kemudahan pada proses kerja aparatur desa, khususnya dalam pencarian dan verifikasi data pertanahan. Keberadaan fitur pencarian dalam sistem digital memungkinkan aparatur mengakses informasi nomor persil dan batas tanah secara lebih cepat dibandingkan dengan membuka arsip fisik. Lalu dari segi keamanan, inovasi ini mempunyai standart keamanan yang kuat, sehingga mampu melindungi arsip pertanahan yang ada di desa/kelurahan dalam bentuk dokumen digital yang terverifikasi. Hal ini sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu ketersediaan arsip dalam jangka waktu yang lama dan selalu tersedia.

Sedangkan pada faktor penghambat, pada temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun inovasi ADIARTA telah memberikan kemudahan bagi aparatur desa/kelurahan dalam mengakses dan mengelola arsip pertanahan, sistem ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Salah satu hambatan yang dirasakan pengguna adalah belum optimalnya kelengkapan fitur dalam aplikasi, sehingga kebutuhan kerja aparatur belum sepenuhnya terakomodasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi ADIARTA masih memerlukan pengembangan lanjutan agar sistem dapat menyesuaikan dengan kebutuhan operasional di tingkat kelurahan.

Selain itu, terdapat penolakan yang dilakukan oleh desa/kelurahan menunjukkan bahwa tujuan utama ADIARTA untuk mengatasi praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan arsip pertanahan belum sepenuhnya tercapai. Ketiadaan regulasi yang bersifat mengikat terkait kewajiban penerapan ADIARTA menyebabkan inovasi ini tidak memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan tata kelola arsip secara menyeluruh di desa/kelurahan. Akibatnya, meskipun ADIARTA dirancang untuk meningkatkan transparansi dan pengendalian arsip guna meminimalkan penyalahgunaan wewenang, tujuan tersebut menjadi kurang optimal. keterbatasan dalam optimalisasi sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi inovasi ADIARTA. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan proses alih media arsip tanah berlangsung lebih lambat dari target yang telah ditetapkan

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, maka dapat disimpulkan bahwa Inovasi Alih Media Arsip Tanah

(ADIARTA) pada dasarnya telah berjalan dengan baik sebagai respons atas permasalahan pengelolaan arsip pertanahan yang sebelumnya masih bergantung pada sistem manual. Digitalisasi arsip melalui ADIARTA mampu menjawab kebutuhan utama pemerintah desa/kelurahan dalam menjaga keamanan, keberlanjutan, dan keteraturan arsip tanah yang memiliki nilai administratif dan hukum tinggi. Tetapi pencapaian inovasi ini belum optimal dimana kurangnya sdm dan mesin scan, kurangnya pendekatan dan sosialisasi, serta belum adanya regulasi yang mengikat, sehingga desa dan kelurahan masih memiliki kewenangan untuk menolak penerapannya. Hal tersebut kemudian berdampak pada belum optimalnya upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti terkait Inovasi Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu sebagai upaya perbaikan dan pengembangan Inovasi Alih Media Arsip Tanah di desa/kelurahan Kota Batu. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya regulasi dan aturan yang lebih kuat dan mengikat terkait pelaksanaan ADIARTA agar implementasinya dapat berjalan seragam di seluruh desa dan kelurahan dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan optimal.
- b. Pendekatan kepada desa lebih diperhatikan, agar desa/kelurahan secara keseluruhan dapat menerima inovasi ADIARTA, selain itu juga diperlukan sanksi bagi desa/kelurahan yang menolak penerapan alih media arsip.
- c. Pengembangan sistem ADIARTA perlu terus dilakukan dengan menambahkan fitur yang sesuai dengan kebutuhan, seperti integrasi pada peta PBB dan dokumen terkait guna meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelayanan.
- d. Optimalisasi sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui agar target pelaksanaan inovasi dapat tercapai sesuai waktu yang direncanakan, sehingga dapat secepatnya diterapkan di seluruh desa/kelurahan Kota Batu
- e. Sosialisasi kepada masyarakat perlu diperluas agar pemahaman terhadap keberadaan, tujuan, dan manfaat ADIARTA semakin meningkat, sehingga inovasi ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Choi, T., & Chandler, S. M. (2020). Knowledge Vacuum: An Organizational Learning Dynamic Of How E-

- Government Innovations Fail. *Government Information Quarterly*, 37(1).
- Fidianingsih, V., & Fanida, E. H. (2020). Inovasi Layanan e-SIM (Elektronik Surat Izin Mengemudi) Sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo. *Publika*, 8(5).
- Huda, M., & Suhaini, A. (2024). Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Pejabat yang Bertugas dalam Pembuatan Akta Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadire*, 5(2), 13-29.
- Khaeruddin, K., Afdalia, N., & Mustari, U. A. (2023). Pelestarian Arsip di Era Teknologi Digital. *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 2(2).
- Mahardika, L. S., & Niska, F. (2024). Analysis of the "ADIARTA" Innovation as the Savior of Batu City Land Archives. *Jurnal ilmiah sumber daya manusia*, 7(3), 278–283.
- Ma'sum, A., Purwanto, H., & Nugraha, R. W. (2025). Tinjauan Literatur: Dampak Transformasi Digital terhadap Pengambilan Keputusan di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 816-825.
- Mayyasa, B. R., Navisa, F. D., & Suratman, S. (2024). Letter c Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Problematikanya Terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Masal: Studi di Desa Pajangan, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 30(1), 9896–9906
- Nafiah, N., & Oktariyanda, T. A. (2024). Kompleksitas Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Rangka Pencatatan Identitas Kependudukan Di Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 705-714.
- Oktavia, S. (2022). Pengaruh Sistem Pengelolaan Kearsipan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) di Kantor Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. *Jurnal Prospect STIE Rajawali*, 21(1), 13-25.
- Oktaviani, A., & Harjono, S. H. (2019). Kekuatan Pembuktian Surat Letter c Dalam Pemeriksaan Sengketa Tanah di Persidangan. *Verstek*, 7(1).
- Safitri, D. (2018). Pengelolaan Arsip Pertanahan Berbasis Desa: Land Archive Management Village-Based. *Record and Library Journal*, 4(2), 108–119.
- Samudra, A. A., & Fanida, E. H. (2024). Inovasi pelayanan akta kematian dan akta kelahiran melalui aplikasi Nata Anggota Keluarga untuk laporan akta (NAKULA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 13-22.
- Teryambodo, A., & Putra, P. (2024). Analisis Pengelolaan Arsip Dalam Upaya Tertib Arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Magelang. *Journal of Economic and Management*
(JEM) Terekam Jejak, 1(1), 1-20.

